

ABSTRAK

Beras menjadi diskursus utama dalam pangan masyarakat Indonesia setelah melalui proses diskursif yang didorong Orde Baru yang bertujuan untuk melakukan kontrol dan melanggengkan kekuasaan dengan menghadirkannya secara masif dan murah. Berkat proses tersebut beras mendapat fungsi strategis yang dapat memengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mengenai beras sebagai komoditas strategis dengan pendekatan Genealogi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan artikel berita. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan beras dipengaruhi oleh diskursus-diskursus penting yang pemerintah percaya dapat memenuhi tujuan dari kebijakan beras. Pada 1998-2001 besar dipengaruhi oleh diskursus liberal sebagai kondisi dari bantuan ekonomi dari IMF, pada 2001-2004 kebijakan beras mengalami mengurangi pengaruh liberal sedikit demi sedikit ditandai dengan penghentian bantuan dari IMF yang dipengaruhi oleh sentimen nasional serta pelarangan impor beras. Pada 2004-2014 kebijakan beras berupaya untuk memperkuat sektor produksi dan condong pada diskursus liberal dengan pembukaan keran impor. Untuk 2014-2021 kebijakan beras mengalami kebijakan proteksionis yang populis dengan hambatan tarif dan nontarif walaupun pada akhirnya pemerintah berusaha lebih membuka diri ke pasar bebas dengan mengurangi hambatan perdagangan dan lebih terbuka untuk melakukan impor.

Kata Kunci: Beras, Kebijakan, Genealogi, Indonesia

ABSTRACT

Rice has been the main discourse of staple foods in Indonesia through a long discursive process brought by 'orde baru' to establish control and order. Rice is gaining a spot as a strategic commodity that can affect social, political, and economic aspects nationally. The research aims to analyze rice policy as a strategic commodity with a genealogical approach. literature study was used as a research method with regulations, books, journals, and news articles as a source of data. The result shows that the rice policy is affected by discourses that the government believes can fulfill the goals of the rice policy. After the 'orde baru' downfall (1998-2001), the Rice policy was heavily influenced by liberal discourse as a condition from the IMF. 2001-2004 liberal influence decreased as an aftermath of the rising of national sentiment and the ending of IMF aid. 2004-2014 rice policy aims to strengthen rice production but still leans on liberal discourse by opening imports for rice. 2014-2021 protectionism was established as a populist policy with both tariff and non-tariff measurement despite the government's wish to be involved in the free market, and finally lowering protectionism measurement and more open to importing rice.

Keywords: Rice, Policy, Genealogy, Indonesia